

LAPORAN KINERJA

INTERIM BPPB
TRIWULAN 1

2026



bppb.bpom



bppb@pom.go.id



Gedung Eureka 2
Jalan Percetakan Negara
No. 23, Jakarta Pusat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

- Dwi Damayanti, S.Si., Apt., M.Farm.

Ketua

- Normasari, S.Si., M.Biomed

Wakil Ketua

- Fajar Kurniyati, M.Si

Sekretaris

- Zulfa Noerhidayati, S.Farm

Anggota

- Dra. Wiwik Ambarwati, Apt., M.Epid.
- Ratih Pujilestari, S.Si., M.Biomed
- drh. Dewi Sulanjari, M.Si
- Anissa Wari Murti, S.Si., Apt., M.Biomed.
- Yola Eka Erwinda, S.Si, M.Biotech
- drh. Fitra Yovita Delviona P
- Oki Sesshario, S.Ak
- Khanza Jamalina Bodi, S.T.
- Asyifa Fitria Rahmada, S.I.Ikom

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan izin-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi berkala atas implementasi Rencana Strategis (Renstra) BPPB periode 2025–2029 yang tengah berjalan.

Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas terhadap capaian kinerja BPPB pada periode Januari hingga Maret 2026. Fokus pelaporan mencakup progres dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026.

Dalam dokumen ini, dipaparkan capaian target kinerja selama tiga bulan pertama, hasil evaluasi internal terhadap efektivitas kegiatan, serta identifikasi hambatan yang muncul di awal tahun anggaran. Hal

ini dimaksudkan agar rencana tindak lanjut dapat segera disusun demi menjaga konsistensi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Penyusunan laporan ini senantiasa mengacu pada pedoman Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berlaku.

Kami berharap capaian yang tersaji dalam laporan Triwulan I ini dapat menjadi acuan strategis dalam mengawal pelaksanaan program kerja, sehingga Sasaran Strategis BPPB sepanjang tahun 2026 dapat tercapai secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pengawasan produk biologi di Indonesia.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga dedikasi kita bersama terus memperkuat peran BPPB dalam melayani masyarakat.

Jakarta, 27 April 2026

Kepala Balai Pengujian Produk Biologi



Dwi Damayanti, S.Si., Apt., M.Farm.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) sebagai entitas satuan kerja mandiri di BPOM, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM. Lapkin interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada kepada organisasi, para pemangku kepentingan, penerima layanan dan masyarakat pada umumnya, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Tujuan BPPB untuk periode 2025 – 2029 berpedoman pada tujuan BPOM yaitu mendukung **1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**: dalam hal ini menegaskan komitmen BPPB dalam memastikan bahwa semua Produk Biologi yang beredar di pasaran memenuhi standar mutu yang ditetapkan, dan **2) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: dimana BPPB berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas.

Mengacu pada Sasaran Strategis BPOM 2025-2029 maka Sasaran Kegiatan (SK) BPPB mencakup tujuan yang lebih spesifik dan terukur khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Produk Biologi di Indonesia, yaitu: **SK1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** yang didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi (1), Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar (2), Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar (3), dan Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi (4); **SK2. Layanan Publik BPPB yang Prima** dengan 1 (satu) IKK, yaitu Indeks Pelayanan Publik BPPB; **SK3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal** dengan 4 (empat) IKK, yaitu Nilai Pembangunan ZI BPPB, Nilai AKIP BPPB, Nilai Kinerja Anggaran BPPB, dan Indeks Manajemen Risiko BPPB.

Pada triwulan I tahun 2026, dari 9 (sembilan) IKK BPPB, dilakukan pengukuran terhadap 3 (tiga) IKK yaitu: 1). Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi dengan capaian 102,03% (kategori Sangat Baik); 2). Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar dengan capaian 99,94% (kategori Baik); 3). Persentase Sampel Balai

Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar dengan capaian 109,53% (kategori Sangat Baik). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPB Triwulan I Tahun 2026 sebesar **103,83%** dengan kategori **Istimewa**.

Pagu awal anggaran BPPB tahun 2026 adalah Rp6.604.661.000,00 sesuai DIPA Nomor SP DIPA- 063.01.2.691154/2026 tanggal 01 Desember 2025. Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Utama Badan POM Nomor PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden, BPPB melakukan penyesuaian berupa pergeseran anggaran ke RO Khusus senilai Rp72.404.000 melalui proses revisi terpusat dari Badan POM sesuai dengan surat pengesahan DIPA Petikan Nomor SP DIPA- 063.01.2.691154/2026 tanggal 24 Desember 2025, sehingga pagu anggaran BPPB efektif menjadi Rp6.532.257.000,00. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2026 sejumlah Rp835.630.331,00 atau 12,79%, dan tingkat efisiensi anggaran adalah 0,41 kategori Efisien.

Terdapat beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Ketidaksesuaian antara pengadaan instrumen dengan rencana pengembangan kompetensi personel teknis.
2. Akumulasi verifikasi dokumen akibat lonjakan volume sampel pelulusan dengan tenggat waktu penyelesaian yang bersamaan.
3. Keterlambatan sampel rujuk internal menghambat efisiensi pengujian kolektif dan berisiko melampaui baku mutu waktu pengujian.
4. Pengadaan bahan uji keperluan pengembangan Metode Analisis yang baru dapat terpenuhi di akhir tahun 2026
5. Penyelesaian RATL terkait layanan hewan uji masih memerlukan keputusan manajemen
6. Belum tersedianya prosedur internal formal untuk pengukuran dan pelaporan kinerja di BPPB
7. Capaian IKPA BPPB Triwulan I belum maksimal pada indikator RPD dan realisasi penyerapan anggaran.
8. Manajemen risiko berjalan stabil melalui monev bulanan, namun memerlukan penguatan komunikasi Penanggung Jawab risiko dan perluasan sosialisasi staf.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, BPPB harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Evaluasi ulang pemenuhan Standar Peralatan dan SKL BPPB
2. Menerapkan sistem skala prioritas dan redistribusi beban kerja untuk mempercepat verifikasi dokumen.
3. Memperkuat koordinasi dengan unit pengirim sampel (Balai/Balai Besar POM/KMEI) untuk memastikan ketepatan jadwal pengujian kolektif.

4. Melakukan penyesuaian target penyelesaian verifikasi MA atau mencari alternatif sumber baku pembanding.
5. Mengagendakan rapat koordinasi manajemen untuk memutuskan kebijakan pengadaan mencit usia 5 minggu.
6. Menyusun dan menetapkan SOP internal untuk standarisasi pengukuran serta pelaporan kinerja.
7. Mengevaluasi kalender kegiatan secara berkala demi meningkatkan akurasi RPD dan realisasi anggaran.
8. Melaksanakan sosialisasi manajemen risiko secara menyeluruh kepada seluruh staf dan memperketat komunikasi dengan Penanggung Jawab risiko.

HIGHLIGHT KINERJA

Pada triwulan pertama tahun 2026, Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kinerja organisasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui penciptaan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, serta melalui pengembangan dan pemeliharaan inovasi yang mendukung penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BPPB telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Produk Biologi No. HK.02.02.11.02.26.19 tahun 2026. Seluruh personel BPPB berperan aktif dalam enam area perubahan sebagai upaya nyata mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pada awal tahun, BPPB juga menetapkan rencana kerja, target prioritas, serta program perubahan sebagai arah strategis pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerja BPPB. Dokumen rencana kerja tersebut merupakan acuan dan bentuk komitmen BPPB dalam mewujudkan pemerintahan yang memiliki integritas, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik. Untuk mengkomunikasikan komitmen tersebut, BPPB telah melaksanakan kegiatan **Pencanangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas**. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi serta menumbuhkan dukungan bersama terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPPB. Kegiatan tersebut turut melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal sebagai bentuk transparansi dan kolaborasi dalam memastikan keberlanjutan implementasi pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik BPPB, salah satu kegiatan utama yang diselenggarakan pada periode ini adalah **Forum Konsultasi Publik (FKP)**, sebagai sarana membangun komunikasi dua arah dengan pengguna layanan. Melalui kegiatan ini, BPPB melakukan sosialisasi jenis serta prosedur layanan yang tersedia, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi pelanggan untuk menyampaikan saran, masukan, dan harapan secara langsung. Diskusi yang berlangsung secara terbuka dan konstruktif menghasilkan berbagai umpan balik yang menjadi dasar evaluasi serta penyempurnaan standar pelayanan publik BPPB tahun 2026. Upaya ini mencerminkan komitmen BPPB dalam mewujudkan pelayanan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

BPPB juga secara konsisten mengembangkan serta memelihara berbagai aplikasi digital yang mendukung pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi kinerja organisasi. Inovasi tersebut diwujudkan melalui sejumlah platform, antara lain Aplikasi Lot Release (Bio-Legacy) untuk layanan pelulusan produk vaksin; Aplikasi INFALABS sebagai platform terintegrasi untuk penyediaan hewan percobaan, uji profisiensi, pendaftaran pelatihan, serta pengunduhan sertifikat pelatihan; serta *Subsite* BPPB sebagai media

resmi informasi publik. Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan mutu layanan, tetapi juga mencerminkan komitmen BPPB dalam mewujudkan layanan laboratorium yang modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Dalam perencanaan pengembangannya, BPPB akan melakukan **redesign aplikasi Bio-Legacy** melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPOM. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan fungsionalitas, integrasi sistem, serta kemudahan akses bagi pengguna, sehingga layanan pelulusan produk vaksin dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan di masa mendatang.

Selain itu, BPPB juga terus melakukan pengembangan *platform* digital dalam penguatan tata kelola dan manajemen kinerja. Beberapa *platform* tersebut diantaranya BRIGHT (BPPB Resources for Innovation, Growth, Harmony, and Transparency), SIKAB (Sistem Informasi Kinerja dan Anggaran BPPB), SIGAP-ZI (Sistem Informasi Terintegrasi Pembangunan Zona Integritas) dan SDM Corner. Pada triwulan ini sudah dilakukan **redesign terhadap platform SIGAP-ZI**, berupa penambahan beberapa fitur untuk mempermudah pengisian LKE dan pemenuhan data dukung pengembangan Zona Integritas. Selain itu, pada **platform BRIGHT** juga sudah ditambahkan mekanisme pengajuan serta pemantauan pengadaan tahun 2026.

Pada awal tahun 2026 ini, BPPB juga telah menginisiasi **pengembangan Laboratory Information Management System (LIMS)** melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi BPOM. Salah satu tujuan utama pengembangan sistem ini adalah untuk memperkuat integritas data laboratorium, sehingga seluruh proses pencatatan, pengelolaan, dan pelacakan data pengujian dapat dilakukan secara akurat, konsisten, dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, LIMS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat akses informasi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih tepat.

Dalam rangka penguatan proses bisnis, BPPB pada periode ini melaksanakan pembahasan **reviu tarif PNPB layanan lot release** sebagai upaya penyesuaian terhadap kebutuhan layanan dan operasional. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian tarif dengan prinsip efisiensi, keberlanjutan, serta kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu, BPPB juga melakukan reviu dan sosialisasi terhadap **SOP Mikro Layanan Lot Release serta Layanan Penyediaan Hewan Uji** guna memastikan standar operasional yang lebih efektif, seragam, dan sesuai dengan pelaksanaannya.

Secara keseluruhan, berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan pada periode ini mencerminkan komitmen BPPB dalam memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong transformasi digital yang berkelanjutan. Seluruh langkah strategis tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan organisasi yang modern, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus mempertegas peran BPPB sebagai institusi pelayanan publik yang unggul dan terpercaya.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
<i>HIGHLIGHT</i> KINERJA.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	2
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	6
1.4 ISU STRATEGIS.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	10
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	14
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	15
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	17
2.5 METODE PENGUKURAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1 CAPAIAN KINERJA BPPB	26
3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI.....	57
3.4 REALISASI ANGGARAN	58
BAB IV. PENUTUP	64
LAMPIRAN I.....	65
LAMPIRAN II	68
LAMPIRAN III	70

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

BPPB memiliki tanggung jawab strategis dalam melakukan pengawasan terhadap produk biologi secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan kualitas, keamanan dan efikasi produk biologi, serta melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari proses produksi produk biologi yang tidak sesuai standar. Melalui pengawasan terpadu dan berbasis bukti, BPPB berupaya mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan sistem pengawasan yang akuntabel tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM yang merupakan revisi dari Pedoman SAKIP sebelumnya (Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025) berdasarkan kebijakan dari Kementerian PAN RB terkait Penilaian Kinerja Organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 dan Perubahan metodologi perencanaan kinerja yang sebelumnya menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) pada periode Renstra 2020-2024 menjadi *Logical Framework* pada Renstra 2025-2029.

Secara spesifik, laporan kinerja interm triwulan menyajikan data dan informasi tentang pencapaian target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) per triwulan pada tahun 2026. Oleh karena itu, laporan ini dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Penyusunan laporan kinerja interm BPPB triwulan 1 tahun 2026 merujuk pada Rencana Strategis BPPB tahun 2025-2029, Rencana Kerja Tahun 2026 serta Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala BPPB tahun 2026.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), dijelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan kerja mandiri yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu serta/atau fungsi teknis penunjang dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

UPT di lingkungan PPPOMN dipimpin oleh seorang Kepala yang berada langsung di bawah, serta bertanggung jawab kepada Kepala PPPOMN. Di lingkungan PPPOMN terdapat tiga UPT, yaitu Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) yang memiliki tugas melakukan pengujian di bidang produk biologi, Balai Kalibrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kalibrasi alat ukur pada laboratorium pengujian obat dan makanan, serta Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) yang melaksanakan pengujian khusus di bidang obat dan makanan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 358 Tahun 2025 mengenai uraian fungsi UPT pada PPPOMN, BPPB memiliki sejumlah fungsi utama yang meliputi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
2. Pelaksanaan pengujian mutu Produk Biologi
3. Pelaksanaan sertifikasi pelulusan vaksin, bulk vaksin, serta Produk Biologi lainnya
4. Pelaksanaan pengujian toksikologi Obat dan Makanan
5. Pengelolaan hewan percobaan untuk mendukung pengujian mutu Produk Biologi dan toksikologi
6. Pelaksanaan validasi atau verifikasi metode analisis sesuai standar
7. Penyelenggaraan uji banding, uji kolaborasi, dan uji profisiensi baik di tingkat nasional maupun internasional
8. Pengembangan jejaring pengujian serta sistem rujukan laboratorium
9. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
10. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

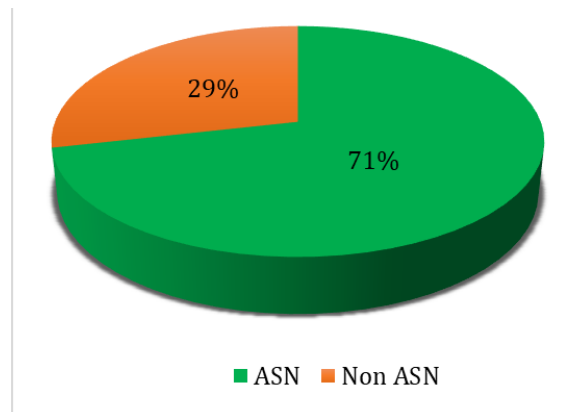
Susunan organisasi BPPB berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan struktur organisasi, tugas, dan fungsi di lingkungan BPOM baik pusat maupun unit pelaksana teknis (balai/balai besar) guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan serta pelaksanaan direktif penugasan oleh Kepala BPPB, dibentuk pula Ketua Tim Indikator Kinerja, Ketua Tim Kerja, Penanggung Jawab Pengujian dan Penanggung Jawab Kegiatan. Ketentuan mengenai pembentukan dan penetapan tim tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala Balai Pengujian Produk Biologi Nomor HK.02.02.11.04.26.35 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua Tim Indikator Kinerja, Ketua Tim Kerja Pembangunan

Zona Integritas (ZI), Ketua Tim Direktif Penugasan, Manajer Mutu, Penanggung Jawab (PJ) Dokumen dan PJ Pengujian.

Sumber Daya Manusia

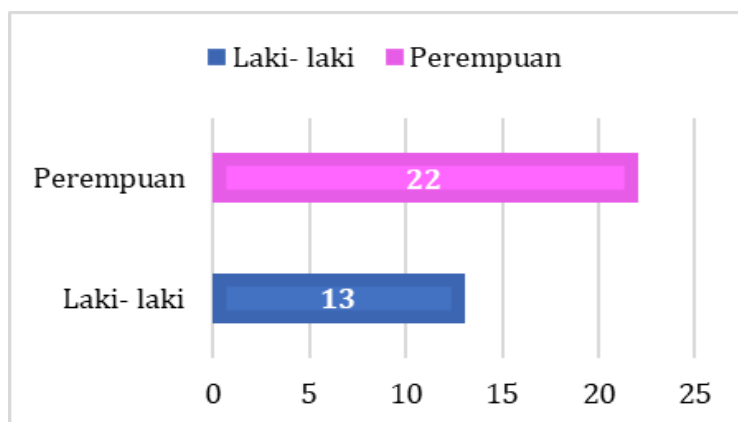
Pada periode Triwulan I Tahun 2026, terdapat 2 (dua) orang pegawai BPPB yang memperoleh perubahan jabatan, yaitu 1 (satu) orang dari jabatan Pengadministrasi Perkantoran menjadi Penata Layanan Operasional dan 1 (satu) orang dari jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama.

Sampai dengan 31 Maret 2026 BPPB tercatat memiliki 35 orang pegawai, yang terdiri atas 25 orang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) (71%) dan 10 orang pegawai non-ASN (29%) (Gambar 1.1).



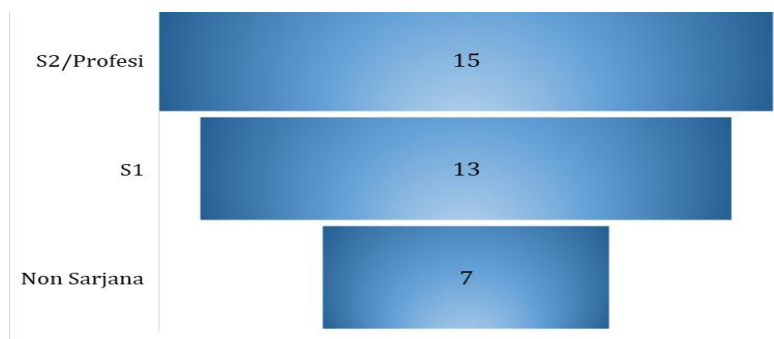
Gambar 1.1. Diagram Pegawai BPPB Periode Triwulan 1 Tahun 2026

Ditinjau dari aspek gender, pegawai BPPB terdiri atas 13 (tiga belas) orang berjenis kelamin laki-laki dan 22 (dua puluh dua) orang berjenis kelamin perempuan. (Gambar 1.2).



Gambar 1.2. Diagram Pendidikan Pegawai BPPB Periode Triwulan 1 Tahun 2026

Selain itu, jika ditinjau dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai BPPB terdiri atas 13 orang lulusan Sarjana (S1), 15 orang lulusan Magister (S2)/Profesi, serta 7 orang dengan kualifikasi non sarjana, sebagaimana tercantum pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Diagram Pendidikan Pegawai BPPB Periode Triwulan 1 Tahun 2026

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, komposisi jabatan pegawai ASN BPPB, tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Komposisi Jabatan ASN BPPB

Jabatan	Jumlah	Status
Kepala Balai	1	PNS
Kasubbag Tata Usaha	1	PNS
PFM Ahli Pertama	10	PNS
PFM Ahli Muda	6	PNS
PFM Ahli Madya	3	PNS
Arsiparis Ahli Pertama	1	PNS
PFM Terampil	1	PNS
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	PNS
Penata Layanan Operasional	1	PNS
Total	25	

Pada triwulan pertama tahun 2026 ini, proses penetapan Analisis Beban Kerja (ABK) BPPB sebagai satuan kerja mandiri telah memasuki tahap pengisian Kertas Kerja Kebutuhan ABK untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Pengujian untuk jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya yang dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Biro SDM. Namun demikian, hingga saat ini BPPB sebagai satuan kerja mandiri belum didukung oleh sumber daya manusia pada jabatan fungsional Perencana dan Analis SDM Aparatur, yang merupakan posisi esensial dalam mendukung perencanaan, pengelolaan kinerja, serta penguatan proses bisnis organisasi.

Ketatalaksanaan

Dalam rangka menjamin mutu hasil pengujian, BPPB mengimplementasikan berbagai sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional sebagai landasan utama untuk memastikan akurasi, konsistensi, dan keandalan proses laboratorium. Penerapan sistem manajemen mutu tersebut tidak hanya meningkatkan kredibilitas institusi, tetapi juga menjamin bahwa pengujian produk biologi dilaksanakan sesuai dengan standar internasional, sehingga hasil pengujian dapat diterima dan dipercaya oleh regulator, industri, serta mitra internasional.

Sejumlah standar mutu terverifikasi telah diimplementasikan di BPPB melalui mekanisme audit internal dan eksternal. Melalui audit internal yang dilakukan oleh auditor internal BPPB maupun BPOM, BPPB menerapkan beberapa standar mutu, antara lain: ISO 9001:2015, ISO 17025:2017, ISO 17043:2010 serta ISO 37001:2015.

Dalam konteks audit eksternal, BPPB memperoleh pengakuan Maturity Level 4 untuk fungsi Lot Release (LR) serta Laboratory Access and Testing (LT) melalui kegiatan WHO NRA Benchmarking pada tahun 2019. Selanjutnya, kedua fungsi tersebut juga direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai WHO *Listed Authority* (WLA) berdasarkan hasil *Technical Advisory Group on WLA* (TAG-WLA) Meeting pada tahun 2025. Lebih lanjut, BPPB ditetapkan sebagai Laboratorium Kontrak WHO dengan ruang lingkup pengujian potensi vaksin *Diphtheria Toxoid*, *Tetanus Toxoid*, dan *Pertussis (whole cell)*, serta campak pada tahun 2021 dan 2024.

Selain itu, BPPB juga menerapkan beberapa Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pemanfaatan sejumlah aplikasi dan platform digital yang hingga kini terus dikembangkan. Aplikasi yang digunakan antara lain:

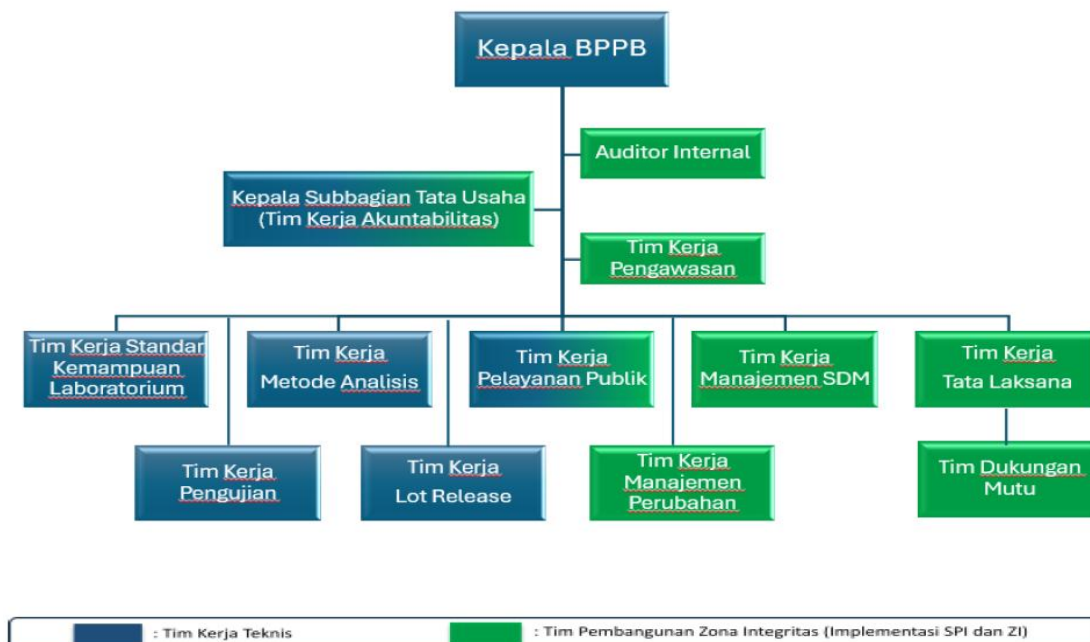
1. Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) BPOM terkait pelaporan hasil pengujian sampel vaksin rujuk dari internal UPT Balai, Balai Besar dan Loka POM di daerah
2. Aplikasi *Biological Products Lot Release Digital Certification System* (BIO-LEGACY) terkait proses sertifikasi *Lot Release* vaksin
3. Aplikasi INFALABS terkait layanan publik untuk hewan uji, pelatihan dan uji profesiensi

4. Aplikasi Sistem Informasi Metode Analisis (SIMA) terkait pengelolaan dokumen dan hasil validasi metode analisis obat dan makanan secara *online* (bergabung dengan PPPOMN)
5. *Digital Platform BPPB Resources for Innovation, Growth, Harmony, and Transparency* (BRIGHT) yang merupakan wadah dengan tujuan simplifikasi akses serta integrasi dokumen elektronik dan aplikasi penunjang bisnis proses BPPB
6. *Digital Platform* Sistem Informasi Kinerja dan Anggaran BPPB (SIKAB) terkait dokumentasi pengelolaan kinerja dan anggaran di BPPB
7. *Digital Platform* MITRA BPPB terkait dengan transformasi pelaksanaan penerapan manajemen risiko di BPPB yang menitikberatkan pada evaluasi risiko dan monitoring rencana tindak pengendalian secara *real time* dan dinamis.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPPB dipimpin oleh Kepala Balai yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Auditor internal, Tim Kerja Teknis dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (Gambar 1.4)

- . Tim Kerja Teknis, terdiri dari Tim Kerja Akuntabilitas, Standar Kemampuan Laboratorium, Metode Analisis, Pengujian, Lot Release dan Pelayanan Publik.
- a. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, terdiri dari Tim Kerja Pengawasan, Manajemen SDM, Tata Laksana, Manajemen Perubahan dan Dukungan Mutu.



Gambar 1.4. Struktur Organisasi BPPB

1.4 ISU STRATEGIS

BPPB merupakan regulator nasional yang mempunyai tugas untuk menjamin mutu, keamanan, dan efikasi produk biologi yang beredar di Indonesia, baik secara pre-market maupun post-market. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, terdapat sejumlah isu strategis yang dihadapi sepanjang triwulan awal tahun 2026, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas laboratorium

Peningkatan kapasitas laboratorium merupakan salah satu isu strategis yang menjadi fokus BPPB dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengujian dan penjaminan mutu produk biologi secara optimal. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengujian serta tuntutan terhadap kualitas dan keandalan hasil uji, BPPB secara bertahap melakukan penguatan sarana dan prasarana laboratorium melalui pengadaan peralatan pengujian yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, penerapan sistem pengendalian akses (*access control*) juga mulai diimplementasikan guna meningkatkan aspek keamanan laboratorium, menjamin integritas sampel dan data, serta mendukung penerapan prinsip *Good Laboratory Practices* (GLP).

Upaya peningkatan kapasitas ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk mendukung efisiensi proses kerja, ketertelusuran (*traceability*), serta pemenuhan standar nasional dan internasional yang berlaku. Dengan demikian, penguatan kapasitas laboratorium diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas hasil pengujian, memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung peran BPPB dalam pengawasan produk biologi baik pada tahap *pre-market* maupun *post-market*.

2. Pengembangan *Laboratory Information Management System* (LIMS).

Pengembangan LIMS di BPPB bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas proses pengujian. Implementasi LIMS diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh alur kerja laboratorium, mulai dari penerimaan sampel, pengujian, pengolahan data, hingga pelaporan hasil secara terdigitalisasi dan terdokumentasi dengan baik.

Namun demikian, pengembangan LIMS masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kebutuhan harmonisasi dengan sistem yang telah ada, serta penyesuaian terhadap standar mutu dan regulasi yang berlaku, termasuk persyaratan *Good Laboratory Practice* (GLP) dan standar internasional lainnya. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem secara optimal juga menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi LIMS.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengujian produk biologi serta tuntutan transparansi dan ketertelusuran data, penguatan pengembangan

LIMS menjadi langkah strategis untuk mendukung transformasi digital di BPPB. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang komprehensif, penguatan kapasitas SDM, serta dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan agar implementasi LIMS dapat berjalan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM masih menjadi salah satu isu strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPB. Kondisi ini tercermin dari adanya kesenjangan (*gap*) baik dari sisi jumlah maupun kompetensi SDM, khususnya pada aspek teknis dan non teknis. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini BPPB sebagai satuan kerja mandiri belum didukung oleh pegawai pada jabatan fungsional Perencana dan Analis SDM Aparatur, sehingga sebagian tugas perencanaan dan pengelolaan SDM masih dirangkap oleh pegawai teknis. Kondisi tersebut berimplikasi pada potensi terganggunya ketepatan waktu (*timeline*) pelaksanaan pengujian, sertifikasi vaksin, serta fungsi pengawasan lainnya. Oleh karena itu, penambahan personel pada Tim Dukungan Manajemen perlu dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk mendukung optimalisasi kinerja organisasi.

4. Desakan permintaan percepatan pelulusan dan pengujian sampel

Permintaan percepatan dalam proses sertifikasi pelulusan dan pengujian sampel, khususnya vaksin tetap menjadi salah satu isu strategis pada awal tahun 2026. Adanya situasi darurat kesehatan seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) suatu penyakit serta kebutuhan program imunisasi nasional, turut menjadi faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Selain itu, kebijakan nasional yang mendorong percepatan distribusi vaksin, tekanan dari industri farmasi dan pemangku kepentingan, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan produk biologi turut memperkuat urgensi percepatan proses pelulusan.

Dalam hal ini, BPPB sebagai regulator dituntut untuk tetap menjaga independensi dari berbagai tekanan, serta melaksanakan proses bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan kinerja yang optimal agar responsif dalam menghadapi kondisi yang memerlukan percepatan pelulusan dan pengujian. Di sisi lain, pembaruan terhadap Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Batch/Lot Vaksin perlu dilakukan secara berkala, khususnya terkait dengan pengaturan kewajiban industri farmasi sebagai pemohon lot release serta batasan-batasan yang harus dipatuhi.

5. Perubahan Tarif Pelulusan dan Pengujian Sampel

Perubahan tarif pelulusan dan pengujian sampel di Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) merupakan salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka menjaga keberlanjutan layanan serta kualitas pengujian. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kebutuhan operasional, perkembangan teknologi pengujian, serta peningkatan standar mutu yang harus dipenuhi, termasuk dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan regulasi dan benchmarking internasional.

Di sisi lain, perubahan tarif juga perlu mempertimbangkan aspek keterjangkauan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri farmasi dan vaksin, agar tidak menimbulkan hambatan dalam proses pengawasan pre-market maupun post-market. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian tarif harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada analisis biaya yang komprehensif, serta disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada para pemangku kepentingan.

Lebih lanjut, perubahan tarif ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium, termasuk dalam pemeliharaan peralatan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan metode pengujian yang lebih mutakhir. Dengan demikian, BPPB tetap mampu memberikan layanan pengujian dan pelulusan produk biologi yang andal, tepat waktu, dan sesuai dengan standar

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Perkembangan produk biologi di Indonesia semakin beragam seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Produk biologi, seperti vaksin, serum, imunoglobulin, produk obat berbasis plasma, dan produk berbasis bioteknologi lainnya, menjadi salah satu komoditas penting dalam mendukung kesehatan masyarakat. Produk ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk obat konvensional, baik dari segi proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi.

Sebagai salah satu komoditas yang diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk biologi memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan, mutu, dan efikasinya. Pengawasan ini menjadi semakin kompleks dengan meningkatnya inovasi di bidang bioteknologi, diversifikasi produk, serta tingginya permintaan pasar domestik maupun internasional. Dalam konteks ini, pengujian dan sertifikasi produk biologi menjadi langkah krusial untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung daya saing produk biologi Indonesia di pasar global.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPPB hadir sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang bertanggung jawab dalam pengujian keamanan, mutu, dan efikasi produk biologi. Dengan peran strategisnya, BPPB berkontribusi dalam memastikan produk biologi yang beredar di Indonesia memenuhi standar internasional, serta mendukung keberhasilan program-program kesehatan nasional yang memanfaatkan produk biologi.

Sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab atas pengawasan mutu dan keamanan produk biologi di Indonesia, BPPB telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025 – 2029.

VISI BPPB

Visi BPPB sejalan dengan Visi Badan POM yang juga berpedoman pada Visi Presiden Terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029, yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.**

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat diantara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Pada Renstra 2025-2029 ini, BPPB memiliki visi yang sejalan dengan visi BPOM namun tetap sesuai dengan ruang lingkup komoditi yang diawasi yaitu terkait Produk Biologi.

MISI BPPB

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih, dan utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**

Pada Renstra 2025-2029 ini, BPPB mendukung misi 1 dan 4 dari misi BPOM.

Misi no. 1 BPOM:

Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

Dalam konteks ini BPPB berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Produk Biologi, yaitu produk yang mengandung bahan biologi yang berasal dari manusia, hewan atau mikroorganisme yang dibuat dengan cara konvensional, antara lain ekstraksi, fraksinasi, reproduksi, kultivasi, atau melalui metode bioteknologi, antara lain fermentasi, rekayasa genetika, kloning, termasuk tetapi tidak terbatas pada enzim, antibodi monoklonal, hormon, sel punca, terapi gen, vaksin, produk darah, produk rekombinan DNA, dan imunoserum.

Sebagai persyaratan utama dalam peredaran produk biologi, BPPB memiliki peranan yang penting dalam proses menerbitkan sertifikat pelulusan dan melakukan pengujian terhadap produk yang akan beredar di masyarakat maupun setelah beredar. *Lot release* (pelulusan) vaksin adalah salah satu bentuk pengawasan mutu untuk melihat konsistensi setiap batch vaksin yang diproduksi, meliputi evaluasi dokumen *summary lot protocol*, *certificate of analysis*, pemerian, dan label serta pengujian laboratorium.

Misi no. 4 BPOM:

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

BPPB merupakan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 5 (lima) jenis layanan dan merupakan Satuan Kerja yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri. Untuk itu, dalam menjalankan tugasnya BPPB harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima kepada seluruh penerima layanan, *stakeholders* dan masyarakat.

TUJUAN BPPB

Tujuan BPPB untuk periode 2025 – 2029 yang mendukung tujuan Badan POM yang mencakup aspek keamanan dan peningkatan kualitas organisasi, yaitu:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Tujuan ini menegaskan komitmen BPPB dalam memastikan bahwa semua Produk Biologi yang beredar di pasaran memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Ini merupakan landasan dasar dalam upaya perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap Produk Biologi yang berkualitas. Dalam memastikan Produk Biologi yang aman dan bermutu, BPPB merujuk pada beberapa regulasi baik nasional maupun internasional diantaranya Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin⁷ maupun *guideline* dari *World Health Organization Technical Report Series* (WHO TRS).

2. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

Melalui tujuan ini, BPPB berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPPB dalam memberikan layanan publik yang prima.

SASARAN KEGIATAN BPPB

Berikut adalah sasaran kegiatan BPPB 2025 - 2029 yang sejalan dengan sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 yang mencakup tujuan-tujuan yang lebih spesifik dan terukur khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Produk Biologi di Indonesia, yaitu

- 1. Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium:** Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama BPPB terkait dengan fungsi *Laboratory Testing* (LT) dan *Lot Release* (LR), BPPB mempunyai 4 (empat) indikator dalam mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini yaitu: Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi (1), Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka *Lot Release* yang Diselesaikan sesuai Standar (2), Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar (3), dan Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi (4);
- 2. Layanan Publik BPPB yang Prima:** Berkenaan dengan aspek pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh BPPB kepada stakeholder dan penerima layanan, BPPB mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini dengan 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik BPPB. Indeks ini tentunya menggambarkan kualitas dari 5 (lima) jenis layanan yang diberikan oleh BPPB yaitu layanan pelulusan batch/lot vaksin, pengujian, penyediaan hewan uji, uji profisiensi dan layanan pelatihan teknis laboratorium;
- 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal:** Dalam mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini, BPPB memiliki 4 (empat) indikator yaitu Nilai Pembangunan ZI BPPB, Nilai AKIP BPPB, Nilai Kinerja Anggaran BPPB, dan Indeks Manajemen Risiko BPPB. Khusus untuk Nilai AKIP BPPB baru akan diukur pada tahun 2026 mengingat BPPB baru menjadi satuan kerja mandiri yang melakukan pengelolaan anggaran secara mandiri pada tahun 2025.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pengujian Produk Biologi No. HK.02.02.11.10.25.37 tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai Pengujian Produk Biologi tahun 2026 yang ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2025 ditetapkan rencana kerja BPPB untuk tahun 2026. Rencana kinerja BPPB tahun 2026 dalam RKT tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan BPPB Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92,1
		Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	98,05%
		Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91%
		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	78,1%
2	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	4,45
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	76
		Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	75
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	4
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2,05

2.1 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pengujian Produk Biologi tahun 2026 ditetapkan pada 26 Februari 2026. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target dari setiap indikator serta alokasi anggaran untuk kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan yang dapat dilihat pada Lampiran II. Alokasi anggaran tahun 2026 adalah Rp 6.532.257.000,- dengan 2 (dua) kegiatan yaitu Pengujian Obat dan Makanan (Rp.3.094.767.000,-) dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM (Rp. 3.437.490.000,-). Matriks PK BPPB 2026 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPPB Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92,1
		Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45%
		Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,3%
		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	78,1%
2	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	4,85
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	76,7
		Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	75
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2,05

PK berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi tingkat keberhasilan organisasi. Dalam implementasinya, penyusunan PK disertai dengan penetapan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) bulanan hingga Desember. Progress capaian RAPK wajib dilaporkan secara rutin melalui fitur *e-performance* pada aplikasi SIMETRIS. Untuk memastikan target tercapai, Biro Perencanaan dan Keuangan memfasilitasi monitoring dan evaluasi (monev) setiap triwulan. Data yang terkumpul kemudian menjadi basis pengukuran kinerja akhir tahun, yakni dengan membandingkan realisasi di lapangan terhadap target yang telah disepakati sebelumnya.

Beberapa indikator kinerja pada PK BPPB 2026 mengalami perubahan dari target yang sudah ditetapkan pada RKT 2026 dan Renstra BPPB Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil pembahasan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan unit pengampu.

Tabel 2.3. Perbandingan Renstra, RKT dan PK BPPB Tahun 2026

No	INDIKATOR	TARGET			JUSTIFIKASI
		Renstra	RKT 2026	PK 2026	
1.	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92,1	92,1	92,1	-
2.	Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	98,05	98,05	99,45	Penetapan target PK mempertimbangkan realisasi tahun 2025
3.	Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91	91	91,3	Penetapan target PK mempertimbangkan realisasi tahun 2025
4.	Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	78,1	78,1	78,1	-
5.	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	4,45	4,45	4,85	Penetapan target PK mempertimbangkan realisasi tahun 2025
6.	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	76	76	76,7	Penetapan target PK mempertimbangkan realisasi tahun 2025

No	INDIKATOR	TARGET			JUSTIFIKASI
		Renstra	RKT 2026	PK 2026	
7.	Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	75	75	75	-
8.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	4	4	5	Penetapan target PK mempertimbangkan realisasi tahun 2025
9.	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2,05	2,05	2,05	-

2.2 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Berdasarkan target IKU yang ditetapkan pada PK BPPB 2026, BPPB menetapkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPB Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TARGET PER TRIWULAN				ANGGARAN
				B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92,1	90,15	90,75	91,64	92,1	638.033.200
		Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	150.000.0000
		Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	1.866.311.200

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2026	TARGET PER TRIWULAN				ANGGARAN
				B03	B06	B09	B12	
		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	78,1%	-	-	75,24	78,1	353.815.600
2	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	4,85	-	-	-	4,85	45.700.000
3	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	76,7	-	-	-	76,7	11.115.000
		Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	75	-	-	-	75	18.677.000
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	5	-	-	-	5	3.437.490.000
		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2,05	-	-	-	2,05	11.115.000

2.3 METODE PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas organisasi melalui penetapan serta verifikasi capaian output dan outcome. Pengukuran dilakukan menggunakan Indikator Kinerja, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), yang telah ditetapkan dan disahkan, dengan metode dan periode pengukuran sebagaimana ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*Raw Data*) dengan tertib.
- b) Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- c) Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance*.
- d) Pimpinan Unit Kerja/Satker melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan objektif. Yang selanjutnya data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja tersebut akan diverifikasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan melalui aplikasi SIMETRIS.






Berdasarkan Surat Edaran Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan⁹, capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Pengukuran **indikator positif/polarisasi maximize** (semakin tinggi realisasi, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penetapan capaian indikator kinerja terhadap Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), ditetapkan kategori sebagai berikut:

Tabel 2.5. Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama⁹

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%		-
Sangat Baik	$100% < x \leq 110%$		Sangat Efektif
Baik	$90% < x \leq 100%$		Efektif
Cukup	$60% \leq x \leq 90%$		Kurang Efektif
Kurang	<60%		Tidak Efektif

Sesuai dengan peraturan yang berlaku⁹, perlu dilakukan normalisasi capaian PK dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja satuan kerja, yaitu:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%
2. Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

Setelah dilakukan untuk perhitungan capaian pada masing-masing indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menentukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periodik. NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Tabel 2.6. Matriks Perhitungan NKO Periodik

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (1)	Normalisasi Capaian PK (2)
1						
2						
3						
Total Capaian PK Periodik (3)						
Nilai Kinerja Organisasi Periodik (Rata-rata Capaian PK) (4)						
Predikat NKO (5)						

Keterangan:

(1) = $(\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$

(2) = capaian kinerja IKU >110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = penjumlahan kolom (2)

(4) = (3) dibagi dengan jumlah IKU

Pada laporan kinerja tahunan, NKO tahunan perlu dihitung karena merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu 1) Capaian Perjanjian Kinerja BPPB dan 2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPPB yang diterbitkan oleh Inspektorat. Perhitungan NKO tahunan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.7. Matriks Perhitungan NKO Tahunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (6)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (7)	Nilai Akhir Capaian PK (8) $\{(6) \times (100\% - (7)) \times 100\}$
1								
2								
3								
Total Capaian PK Tahunan (9)								
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK) Tahunan (10)								
Predikat NKO (11)								

Keterangan:

(6) Normalisasi Capaian PK mengacu pada poin (2). Capaian Indikator Kinerja

(7) Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaian PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana pada Tabel 2.8. Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8. Sumber Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Unit Organisasi	Predikat AKIP
1.	BPOM	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari KemenpanRB
2.	Unit Kerja Eselon I (UK1)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
3.	Unit Kerja Eselon II (Satker Mandiri)	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama
4.	Unit Kerja Eselon II (non Satker Mandiri)	Menggunakan nilai UK1
5.	UPT	Menggunakan nilai hasil evaluasi dari Inspektorat Utama

Tabel 2.9. Faktor Koreksi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

(8) Nilai Akhir Capaian Perjanjian Kinerja. Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin 6) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin 7), dikalikan 100.

$$\text{Nilai Akhir: } \{(6) \times [(100\% - (7))] \times 100\}$$

Namun dikarenakan BPPB baru menjadi satker mandiri pada tahun 2025, maka tahun ini belum dilakukan penilaian AKIP, sehingga dianggap tidak ada koreksi untuk capaian PK.

(9) Total Capaian Perjanjian Kinerja Tahunan






Total capaian perjanjian kinerja merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian perjanjian kinerja (poin 8) pada setiap indikator kinerja.

(10) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahunan

Nilai kinerja organisasi merupakan hasil penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja (poin 9) dibagi dengan jumlah indikator kinerja (rata-rata).




Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.10. Predikat Kinerja Organisasi⁹

Predikat NKO	NKO	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% \leq x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Untuk menentukan nilai perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya, disampaikan dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.11. Kriteria Penentuan Nilai Capaian Perbandingan Realisasi Triwulan dengan Target Tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Selanjutnya, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan. Kategorisasi tingkat efisiensi kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.11. Hal ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dengan capaian output dan outcome yang dihasilkan. Kategorisasi ini digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan pelaksanaan kinerja dapat dilakukan secara optimal.

Perhitungan TE dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

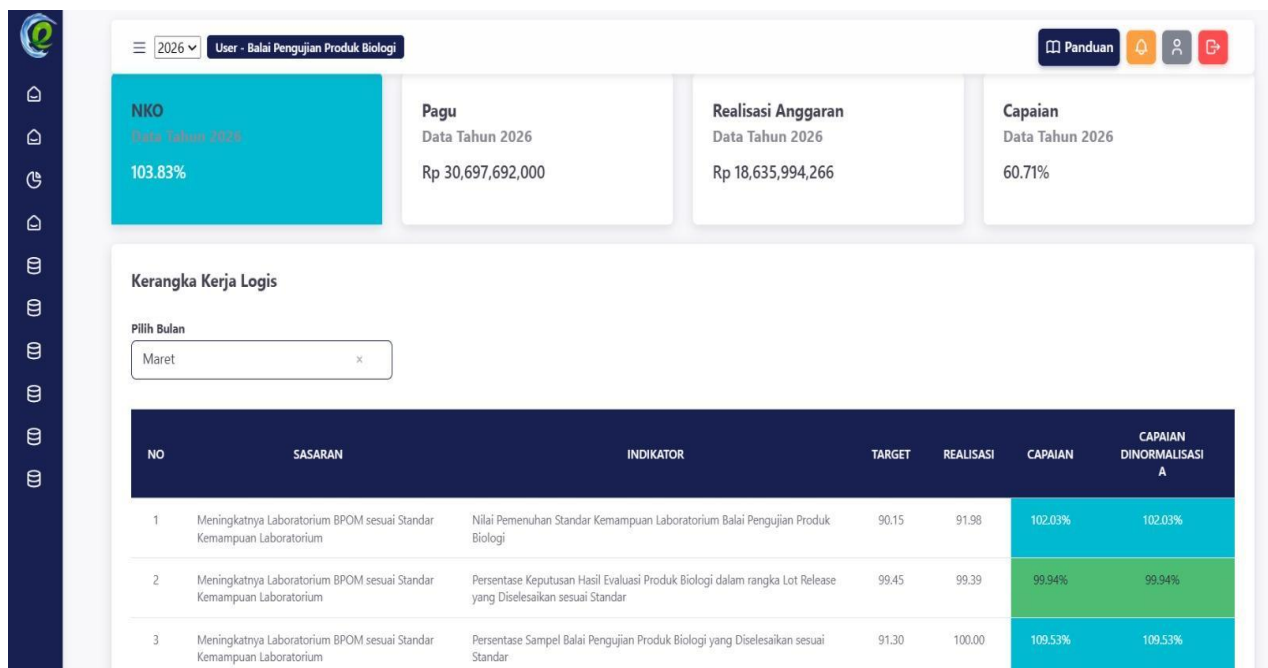
Tabel 2.12. Tingkat Efisiensi (TE) Dihitung Dengan Range Capaian

Tingkat Efisiensi	% Capaian	Keterangan
< 0	-	Tidak Efisien
0 – 0,2	100%	Efisien
0,21 – 0,4	95%	Efisien
0,41 – 0,6	92%	Efisien
0,61 – 0,8	90%	Efisien
0,81 – 1,0	88%	Efisien
1,01 – 1,2	86%	Tidak Efisien
1,21 – 1,4	84%	Tidak Efisien
1,41 – 1,6	80%	Tidak Efisien
1,61 – 1,8	78%	Tidak Efisien
> 1,81	75%	Tidak Efisien

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BPPB

Capaian Kinerja BPPB triwulan I tahun 2026 disusun untuk menyampaikan hasil pengukuran terhadap setiap indikator kinerja dari setiap sasaran kegiatan di BPPB, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program hingga triwulan I tahun 2026. Evaluasi kinerja BPPB untuk triwulan I ini dilakukan pada 1 (satu) dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan penjelasan pada BAB II. Hasil penilaian capaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja BPPB triwulan 1 tahun 2026 tergambar pada tangkap layar dari aplikasi e-performance SIMETRIS (gambar 3.1) dan tabel 3.1. menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPB Triwulan 1 tahun 2026 sebesar **103,83** dengan predikat NKO **Istimewa**.



Gambar 3.1. Tangkap layar Simetris NKO dan Capaian Kinerja BPPB Triwulan 1 Tahun 2026

**Tabel 3.1. Capaian Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja BPPB
Triwulan 1 Tahun 2026**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK	Kriteria Capaian
1	Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	90,15	Nilai	91,98	102,03	102,03	Sangat Baik
2		Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45	Persen	99,39	99,94	99,94	Baik
3		Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,3	Persen	100	109,53	109,53	Sangat Baik
4		Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Persen	TW 3 dan TW 4	N/A	N/A	N/A
5	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	N/A	Nilai	Akhir tahun	N/A	N/A	N/A
6	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Persen	Akhir tahun	N/A	N/A	N/A
7		Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Persen	Akhir tahun	N/A	N/A	N/A
8		Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Nilai	Akhir tahun	N/A	N/A	N/A
9		Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Nilai	Akhir tahun	N/A	N/A	N/A
Total Capaian PK							311,50	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							103,83	
Predikat NKO							Istimewa	

3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Sasaran kegiatan **Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** yang ditetapkan oleh Badan POM bertujuan untuk memastikan laboratorium pengawasan obat dan makanan beroperasi efektif dan untuk menjamin keamanan dan mutu produk obat dan pangan olahan, termasuk produk biologi. Beberapa hal penting yang menunjang tercapainya sasaran tersebut, antara lain:

- Peningkatan mutu pengujian: menerapkan metode akurat, andal, dan tervalidasi sesuai standar nasional/internasional.
- Peralatan dan teknologi: menggunakan instrumen presisi tinggi termasuk perangkat *high-throughput* yang mengikuti kemajuan teknologi.
- Pengembangan SDM: pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional staf laboratorium.
- Sistem manajemen mutu: menerapkan dan memelihara standar internasional seperti ISO/IEC 17025 serta lakukan audit internal dan eksternal berkala.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan pertama ini diukur dengan 3 (tiga) indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Normalisasi Capaian (%)
1	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	90,15	Nilai	91,98	102,03	102,03
2	Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45	Persen	99,39	99,94	99,94
3	Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,3	Persen	100	109,53	109,53
4	Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Persen	TW 3 dan TW 4	N/A	N/A
Capaian Sasaran Kegiatan 1				103,83		
Kriteria Capaian Sasaran Kegiatan 1				Sangat Baik		

Berdasarkan Tabel 3.2. dapat dinyatakan capaian sasaran kegiatan **Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium** pada tahun 2025 adalah 103,83% dengan kategori **Sangat Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran sangat efektif untuk mencapai sasaran strategis.

IKU 1.1. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan SKL UPT Badan POM merupakan agregasi dari SKL tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2 dan tingkat 1. SKL BPPB berada pada tingkat 4, dengan komponen pemenuhan meliputi:

1. Standar Ruang Lingkup Pengujian;
2. Standar Peralatan Laboratorium;
3. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
4. Standar Metode Analisis yang tervalidasi/verifikasi.

Nilai pemenuhan laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi terhadap SKL dihitung berdasarkan penjumlahan dari nilai pemenuhan SRL dengan bobot 50%, nilai pemenuhan Standar Peralatan dengan bobot 20%, nilai pemenuhan Standar Kompetensi Laboratorium dengan bobot 20% dan nilai pemenuhan Standar Metode Terverifikasi dengan bobot 10%.

SKL BPPB digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium BPPB dalam melakukan fungsi pengujian mutu dan keamanan sampel produk biologi, seperti vaksin, bulk vaksin, biosimilar, produk darah dan produk biologi lainnya, serta fungsi pengembangan metode analisis produk biologi dan hewan uji.

a. Perbandingan Kinerja


1) Capaian Indikator Kinerja dengan Target Triwulan I

Berikut data capaian SKL BPPB Triwulan 1 tahun 2026:

Komponen SKL BPPB	Target TW 1		Capaian TW 1	
	Persentase	Pemenuhan	Persentase	Pemenuhan
Standar Ruang Lingkup Pengujian (50%)	90,5	45,25	93,9	46,95
Standar Peralatan Laboratorium (20%)	86,5	17,3	82,47	16,49
Standar Kompetensi Laboratorium (20%)	88	17,6	92,68	18,54
Standar Metode Analisis yang tervalidasi/verifikasi (10%)	100	10	100	10
Total Pemenuhan (%)		90,15		91,98

Berdasarkan capaian nilai persentase total pemenuhan SKL BPPB pada tabel di atas, dilakukan perhitungan perbandingan realisasi kinerja tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja IKU Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium BPPB Triwulan 1 2026


<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Normalisasi Capaian (%)</i>	<i>Kriteria</i>
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	90,15	91,98	102,03	102,03	 Sangat Baik

Capaian kinerja IKU **Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi** tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Total nilai pemenuhan SKL BPPB mencapai 91,98%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90,15%, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja sebesar 102,09%, dengan kategori **Sangat Baik** (Tabel 3.3.).

2) Capaian Indikator Kinerja dengan Target Tahunan

Capaian indikator **Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi** dibandingkan dengan target tahun 2026 adalah sebesar 99,87% dengan kategori **Akan Tercapai** (Kuning) (Tabel 3.4).

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium BPPB Triwulan 1 2026 terhadap Target Tahunan

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Tahun 2026</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Kategori</i>
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92,1	91,98	99,87	Akan Tercapai 

b. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Upaya peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan capaian indikator ini agar bisa mencapai target sesuai PK-RAPK 2026 tercantum pada tabel 3.5 Matriks Rekomendasi Triwulan I.

Tabel 3.5 Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	Pengadaan alat/instrumen dan rencana pengembangan kompetensi dengan alat tersebut tidak sesuai	Evaluasi rencana pengadaan alat dan realisasinya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi pemenuhan Standar Peralatan - Melakukan Reviu SKL BPPB 	Desember	Ya	MR/BPPB/01 MR/BPPB/17 MR/BPPB/20 MR/BPPB/21	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi personel BPPB yang kurang merata - Nilai pemenuhan standar kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi tidak mencapai target yang telah ditetapkan - Implementasi hibah gates foundation: Capacity building terkait pengujian vaksin dan procurement tidak sesuai rencana - Implementasi 3R dalam pengujian vaksin sesuai WHO TRS: Transformasi pengujian dari metode invivo ke invitro tidak sesuai rencana

IKU 1.2. Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar

Indikator **Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar** merupakan indikator kinerja baru dari pecahan Indikator **Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar**. Perubahan IKU ini sudah direvisi dan ditetapkan pada PK dan RAPK BPPB 2025 tanggal 29 Agustus 2025. Salah satu tugas pokok BPPB tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sertifikasi pelulusan vaksin dan bulk vaksin. Tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung fungsi pengawasan *post market* yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Indikator **Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar** digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian proses evaluasi terhadap produk biologi dalam rangka pelulusan batch/lot untuk diedarkan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Evaluasi tersebut menghasilkan keputusan berupa dokumen resmi, yaitu:

- a. Sertifikat Pelulusan (*Certificate of Release/CoR*) : Dokumen yang menyatakan bahwa batch/lot produk biologi telah memenuhi spesifikasi dan persyaratan pelulusan, sehingga dapat diedarkan.
- b. Surat Penolakan: Dokumen yang menyatakan bahwa batch/lot produk biologi tidak memenuhi spesifikasi dan persyaratan pelulusan, sehingga tidak dapat diedarkan.

Yang dimaksud dengan **diselesaikan** adalah bahwa proses evaluasi telah tuntas dan menghasilkan salah satu dari dua keputusan di atas. Dalam hal terdapat pengujian sebagai bagian dari proses pelulusan, maka CoR diterbitkan setelah seluruh pengujian selesai dilakukan, sesuai dengan sistem *clock off* yang berlaku. Standar yang digunakan sebagai acuan dalam indikator ini adalah Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Pelulusan Batch/Lot Vaksin, yang menetapkan persyaratan dan prosedur pelulusan produk biologi.

Indikator ini mencerminkan komitmen terhadap mutu dan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjadi ukuran kinerja dalam menjamin bahwa hanya produk biologi yang telah memenuhi persyaratan yang dapat diedarkan kepada masyarakat.

a. Perbandingan Kinerja


1) Capaian Indikator Kinerja dengan Target Triwulan

Cara perhitungan indikator **Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar** adalah jumlah Laporan Keputusan Hasil Evaluasi yang diterbitkan sesuai standar dibagi jumlah permohonan lot release dikali 100%. Jumlah permohonan lot release adalah jumlah batch/lot sampel produk biologi yang diterima dalam tahun berjalan.

Adapun data jumlah sampel pengujian BPPB yang diselesaikan sesuai standar dari Januari s.d. Maret 2026 adalah sebagai berikut:

<i>Jenis permohonan pelulusan lot release</i>	<i>Jumlah permohonan lot release</i>	<i>Hasil evaluasi yang ditindaklanjuti tepat waktu</i>
Domestik	99	99
Impor	66	65
Total	165	164
Persentase Capaian		99,39

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja IKU Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar Triwulan 1 2026

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Normalisasi Capaian (%)</i>	<i>Kriteria</i>
Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45	99,39	99,94	99,94	 Baik

Capaian kinerja IKU **Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar** triwulan 1 tahun 2026 terhadap target triwulan sebesar 99,94% dengan kategori **Baik**. (Tabel 3.6).

2) Capaian Indikator Kinerja dengan Target Tahunan

Capaian indikator **Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar** dibandingkan dengan target tahun 2026 adalah sebesar 99,94% dengan kategori **Akan Tercapai** (Kuning) (Tabel 3.7).

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar Triwulan 1 2026 terhadap Target Tahunan

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Tahun 2026</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Kategori</i>
Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45	99,39	99,94	Akan Tercapai 

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab belum tercapainya target walaupun kriterianya masih Baik sebagai berikut:

- 1) Terdapat jumlah sampel yang banyak dan simultan dengan batas waktu penyelesaian secara bersamaan.
- 2) Proses verifikasi dokumen yang menumpuk akibat volume sampel yang tinggi namun personel yang bertugas sebagai verifikator terbatas jumlahnya.
- 3) Adanya kendala pada aplikasi lot release sehingga penyelesaian proses evaluasi lebih lama.

Dalam meningkatkan kinerja indikator ini, dapat dilakukan beberapa kegiatan dan upaya seperti:

- 1) Penyusunan skala prioritas penyelesaian sampel berdasarkan tingkat urgensi deadline dan tingkat risiko, sehingga proses evaluasi dapat difokuskan pada sampel yang memiliki kebutuhan penyelesaian paling mendesak.
- 2) Pemantauan secara rutin terhadap progres penyelesaian sampel melalui mekanisme monitoring berkala, khususnya terhadap sampel yang mendekati batas waktu penyelesaian.
- 3) Peningkatan koordinasi internal maupun eksternal yang terlibat dalam proses evaluasi dan verifikasi dokumen

c. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tabel 3.8 Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelol a sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	Capaian tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah sampel dengan batas waktu penyelesaian yang bersamaan, sehingga proses verifikasi dokumen mengalami penumpukan dan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan timeline yang direncanakan	Menyusun skala prioritas berdasarkan urgensi deadline dan tingkat risiko, sehingga sampel dengan batas waktu terdekat dapat diselesaikan terlebih dahulu	Melakukan pemantauan secara rutin terhadap status penyelesaian sampel, khususnya yang memiliki batas waktu terdekat, untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan	Desember	Ya	MR/BPPB/32	Ketidakpatuhan stakeholder dalam pengajuan Lot Release vaksin

IKU 1.3. Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar

Indikator **Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar** merupakan indikator kinerja baru dari pecahan Indikator Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar. Perubahan IKU ini sudah direvisi dan ditetapkan pada PK dan RAPK BPPB 2025 tanggal 29 Agustus 2025. Salah satu tugas pokok BPPB tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah pengujian mutu produk biologi dan pengujian toksikologi terhadap obat dan makanan.

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian proses pengujian terhadap berbagai jenis sampel yang diterima oleh BPPB sesuai dengan standar yang berlaku. Sampel yang dimaksud mencakup beberapa kategori berdasarkan tujuan dan sumbernya, yaitu:

- a. Sampel Pengujian Rujuk
Merupakan sampel yang diterima dalam rangka kegiatan post market surveillance, yaitu pengawasan terhadap produk biologi yang telah beredar di pasaran untuk memastikan konsistensi mutu dan keamanan.
- b. Sampel Pengujian Khusus
Merupakan sampel yang diterima dalam rangka pelaksanaan laboratorium kontrak atau kerja sama, baik dengan instansi pemerintah maupun pihak lain yang relevan.
- c. Sampel Pengujian Kasus
Merupakan sampel yang dikirim untuk pengujian terkait Kasus Ikutan Paska Imunisasi (KIPI), sebagai bagian dari investigasi terhadap kemungkinan efek samping yang terjadi setelah pemberian imunisasi.
- d. Sampel dari Pihak Ketiga
Merupakan sampel yang berasal dari pihak eksternal Badan POM, yang dikirim untuk dilakukan pengujian keamanan produk biologi secara independen.

Yang dimaksud dengan **diselesaikan** adalah bahwa seluruh proses pengujian telah dilakukan secara lengkap dan hasilnya telah dituangkan dalam bentuk Sertifikat atau Laporan Pengujian resmi. Proses pengujian dan pelaporan ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Badan POM serta Standar Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang berlaku, sebagai acuan utama dalam menjamin mutu, akurasi, dan transparansi layanan pengujian.

a. Perbandingan Kinerja

1) Capaian Indikator Kinerja dengan Target Triwulan


Cara perhitungan indikator **Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar** adalah jumlah sampel yang diselesaikan sesuai standar dibagi jumlah sampel yang diselesaikan dikali 100%.

Adapun data jumlah sampel pengujian BPPB yang diselesaikan sesuai standar dari Januari s.d. Maret 2026 adalah sebagai berikut:

<i>Jenis sampel</i>	<i>Jumlah sampel yang diselesaikan</i>	<i>Jumlah sampel yang diselesaikan sesuai standar</i>
Pihak ketiga	35	35
Rujuk	2	2
Kasus	0	0
Khusus	0	0
Alkes	0	0
Total	37	37
Persentase realisasi (%)		100

Berdasarkan data jumlah sampel pengujian BPPB periode Januari sampai dengan Maret 2026, jumlah sampel yang diselesaikan adalah 37 (tiga puluh tujuh) dan yang diselesaikan sesuai standar adalah 37 (tiga puluh tujuh). Sesuai data tersebut maka persentase sampel yang diselesaikan sesuai standar terhadap sampel yang diselesaikan adalah 100%.

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi kinerja IKU Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar Triwulan 1 2026


<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Normalisasi Capaian (%)</i>	<i>Kriteria</i>
Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,30	100	109,53	109,53	 Sangat Baik

Capaian kinerja IKU **Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar** triwulan 1 tahun 2026 terhadap target triwulan sebesar 109,53% dengan kategori **Sangat Baik**. (Tabel 3.9).

2) Capaian Indikator Kinerja dengan Target Tahunan

Capaian indikator **Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar** dibandingkan dengan target tahun 2026 adalah sebesar 109,53% dengan kategori **Tercapai** (Hijau) (Tabel 3.10).

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar Triwulan 1 2026 terhadap Target Tahunan

<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Tahun 2026</i>	<i>Realisasi (%)</i>	<i>Capaian (%)</i>	<i>Kategori</i>
Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,30	100	109,53	Tercapai 

b. Analisis Pendukung Keberhasilan

Indikator telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja triwulan 1 tahun 2026, antara lain:

- Sampel vaksin atau produk biologi yang datang pada periode Januari hingga Maret tahun 2026 ini adalah sampel yang telah tersedia baku pembandingnya.
- Ketersediaan hewan uji dapat mencukupi kebutuhan pengujian pada TW 1 ini.
- Belum terdapat antrian sampel yang terlalu berarti sehingga pengujian dapat diselesaikan sesuai baku mutu waktunya.
- Penyampaian Catatan Pengujian (CP), Lampiran Catatan Pengujian (LCP), dan Laporan Hasil Uji (LHU) oleh penguji kepada verifikator (untuk beberapa parameter uji) sudah dalam bentuk softcopy sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

c. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Tabel 3.11. Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	Kedatangan beberapa sampel dalam rangka pelaksanaan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat Tahun 2026 (sampel rujuk internal BPOM) tidak sesuai jadwal yang telah disepakati. Sampel tersebut adalah sampel yang dijadwalkan untuk diuji dalam satu running dalam rangka efisiensi baku pembanding yang terbatas. Hal ini berpotensi tidak memenuhi baku mutu waktu pengujian.	Melakukan penghentian baku mutu waktu pengujian (<i>clock off</i>) untuk sampel yang terdampak berdasarkan surat justifikasi balai pengirim sampel.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan pengujian di BPPB. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif untuk dapat menyediakan baku pembanding yang diperlukan dalam pengujian sampel rujuk internal BPOM. Pengiriman surat pemberitahuan ke seluruh Balai/loka POM terkait: narahubung pengiriman sampel, alamat lengkap BPPB, dan pencantuman justifikasi jika sampel dikirimkan tidak sesuai jadwal. 	Desember	Ya	MR/BPPB/02	- Pengujian sampel yang menggunakan hewan uji tidak memenuhi waktu mutu baku

IKU 1.4. Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi

Metode analisis (MA) yang dikembangkan di BPPB merupakan metode pengujian produk biologi, pengelolaan hewan percobaan dan pengujian dalam rangka menjamin mutu kultur sel yang dikembangkan oleh BPPB melalui proses validasi, verifikasi, dan reverifikasi. Pengembangan MA ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kompetensi laboratorium BPPB dan peningkatan kapasitas pengujian dalam rangka *lot release* dan pengawasan post-market.

Perhitungan persentase realisasi pengembangan MA berdasarkan manual IKU adalah perbandingan jumlah MA yang dikembangkan terhadap jumlah MA pengujian produk biologi sesuai kebutuhan MA di BPPB. Berdasarkan Renstra BPPB tahun 2025-2029, target IKU Persentase MA yang dikembangkan terhadap kebutuhan metode pengujian di BPPB pada akhir Renstra adalah sebesar 95,24%, dengan target realisasi MA hingga akhir periode Renstra 2025-2029 adalah 100 MA terdapat 105 kebutuhan MA pengujian di BPPB.

Hingga tahun 2025, BPPB telah mengembangkan 76 MA dan pada tahun 2026 BPPB menargetkan akan menyelesaikan 6 MA sehingga target IKU persentase pengembangan MA adalah 78,10%. Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPB tahun 2026 yang sudah ditetapkan oleh Kepala BPPB pada tanggal 26 Februari 2026, target MA akan dilaporkan pada triwulan 3 sebanyak 3 MA (75,24%) dan pada triwulan 4 sebanyak 3 MA (78,10%).

Realisasi kinerja pada triwulan 1 tahun 2026 untuk indikator kinerja Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi belum dapat dilaporkan karena merupakan target pada triwulan 3 dan 4. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja Persentase Pengembangan MA ini antara lain:

- a. Identifikasi kebutuhan bahan uji, bahan fungsional dan peralatan yang diperlukan dalam validasi/verifikasi metode analisis
- b. Pengajuan pengadaan bahan uji, bahan fungsional dan suku cadang untuk uji validasi/verifikasi metode analisis berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan
- c. Pembuatan protokol validasi/verifikasi metode analisis oleh masing-masing tim pelaksana
- d. Monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan pengembangan MA setiap bulan melalui rapat monitoring dan evaluasi kinerja anggaran BPPB

Upaya peningkatan kinerja pada triwulan selanjutnya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan capaian indikator ini agar bisa mencapai target sesuai PK-RAPK 2026 tercantum pada tabel 3.12 Matriks Rekomendasi Triwulan I.

Tabel 3.12 Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Time-line</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Persentase MA yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di BPPB	Baku USP insulin human baru dapat diterima pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027, sehingga verifikasi MA uji potensi insulin human dengan HPLC tidak dapat diselesaikan pada tahun 2026	Melakukan penghentian baku mutu waktu pengujian (<i>clock off</i>) untuk sampel yang terdampak berdasarkan surat justifikasi balai pengirim sampel.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengidentifikasi keperluan bahan uji dan bahan fungsional untuk uji endotoksin dengan kit endotoksin rekombinan 2) Pengadaan kit Endotoksin Rekombinan 3) Melakukan uji coba kit Endotoksin Rekombinan pada bulan April 2026 4) Koordinasi dengan produsen domestik terkait penyediaan baku 	Juni	Ya	MR/BPPB/03	Penyelesaian pengujian metode analisis tidak sesuai dengan timeline yang direncanakan

Sasaran Kegiatan 2

Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Balai Pengujian Produk Biologi berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan mutu dan kinerja pelayanannya agar selaras dengan kebutuhan pengguna layanan. Penerapan standar pelayanan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Standar pelayanan tersebut menekankan nilai transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, Balai Pengujian Produk Biologi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM serta Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Produk Biologi Nomor HK.02.02.11.04.26.37 tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPPB, terdapat lima jenis layanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Produk Biologi, yaitu:

- a. Layanan Penyediaan Hewan Uji
- b. Layanan Pengujian Produk Biologi dan Toksikologi
- c. Layanan Pelulusan Batch/ Lot Vaksin
- d. Layanan Uji Profisiensi Endotoksin
- e. Layanan Pelatihan Teknis Laboratorium

Sasaran kegiatan Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima diukur dari 1 (satu) indikator yaitu [Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima](#). Berdasarkan Tabel 3.13 sasaran kegiatan dua ini dilakukan pengukuran di akhir tahun.

Tabel 3.13 Pencapaian Sasaran Kegiatan Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	2026	Capaian Triwulan I			Capaian terhadap Target 2026 %
		T	T	R	%	
1	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima	4,85	-	-	-	-

IKU 2.1. Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima

Penilaian IPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan (24%)
2. Profesionalitas SDM (25%)
3. Sarana Prasarana (18%)
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%)
6. Inovasi (12%)

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilaksanakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik pada setiap aspek sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan secara nasional. Aspek yang dinilai mencakup dimensi kualitas layanan, kecepatan respons, keterbukaan informasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM dilakukan melalui pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan penyampaian data dukung secara sistematis melalui aplikasi evortala.pom.go.id. Data dan dokumen yang telah dikirimkan selanjutnya diverifikasi dan dinilai oleh Tim Penilai.

Kategorisasi penilaian IPP adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Kegiatan yang telah dilakukan pada Triwulan I Tahun 2026 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Melakukan reuiu Standar Pelayanan Publik 2026 secara internal, Melakukan pembasahan rancangan standar pelayanan dengan *stakeholder* dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik 2026 serta mempublikasikan rancangan SP hasil pembahasan pada kanal media sosial BPPB untuk menjaring masukkan pelanggan sebelum difinalisasi.

2. Melakukan survei mandiri, Pembuatan Laporan SKM, IPKP dan IPAK Bulan Januari-Maret 2026 dan dilaporkan secara rutin pada aplikasi SAPA APIP pada bulan Januari-Maret 2026
3. Menindaklanjuti dan membuat laporan monitoring konsultasi dan pengaduan bulan Januari-Maret 2026 dan dilaporkan secara rutin pada aplikasi SIMPEL
4. Melaksanakan dan memonitoring keberlanjutan Inovasi khususnya Inovasi Aplikasi *Lot Release* Vaksin (Bio-Legacy)
5. Memberikan reward pada petugas layanan (*service excellence*) TW 1 dan Memberikan reward pada pelanggan tertib administrasi yang disampaikan di dalam FKP BPPB 2026

Tabel 3.14 Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timelin e</i>	<i>Apakah sudah dikelol a sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Indeks Pelayanan Publik BPPB	Berapa RATL pada tahun 2025 belum selesai ditindaklanjuti dan butuh untuk di diskusikan di level management terutama terkait permintaan pelanggan untuk pembelian mencit usia 5 minggu	Rapat koordinasi dengan tim teknis terkait , katim di lingkungan BPPB dan Kepala Balai dan pembahasan hal dimaksud pada RTM TW 1 2026	Pembukaan kembali layanan mencit usia 5 minggu sebagai TL masukan pelanggan (hasil SKM) yang masih pending	April	Ya	MR/BPPB/04	- Forum Konsultasi Publik BPPB Tahun 2025 tidak terlaksana sehingga Standar Pelayanan Publik BPPB tidak mendapat masukan dari 5 (lima) komponen masyarakat

Sasaran Kegiatan 3

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Dalam rangka memperkuat efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan organisasi, Balai Pengujian Produk Biologi dengan Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal berupaya menciptakan tata kelola pemerintah yang optimal di seluruh unit organisasi. Sasaran ini mencakup pengembangan sistem yang responsif, transparan, dan akuntabel, yang mendukung pencapaian tujuan strategis secara menyeluruh. Dengan meningkatkan kualitas tata kelola, diharapkan tercipta layanan publik yang lebih baik, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta keputusan yang lebih berbasis data dan inovasi. Langkah-langkah strategis akan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas unit, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses tata kelola yang modern dan berkelanjutan.

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal didukung oleh 4 (empat) indikator, yaitu [Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi](#), [Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi](#), [Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi](#) dan [Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi](#). Berdasarkan Tabel 3.15 sasaran kegiatan tiga ini dilakukan pengukuran di akhir tahun.

Tabel 3.15 Pencapaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal Triwulan I Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	2026	Capaian Triwulan I			Capaian terhadap Target 2026 %
		T	T	R	%	
1	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi		-	-	-	-
2	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi		-	-	-	-
3	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi		-	-	-	-
Capaian Sasaran Kegiatan 3		Akhir Tahun				

IKU 3.1. Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB) berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi melalui enam area perubahan sebagai bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas. Implementasi ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, berorientasi pada pelayanan, serta memiliki kinerja yang tinggi, sehingga kualitas layanan publik di lingkungan BPPB dapat terus ditingkatkan.

Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang menunjukkan komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani. Pembangunan ZI dilaksanakan melalui penerapan reformasi birokrasi yang berfokus pada upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat Menuju WBK diberikan kepada satuan kerja yang telah memenuhi sebagian besar indikator pada aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, predikat Menuju WBBM diberikan kepada satuan kerja yang tidak hanya memenuhi komponen tersebut, tetapi juga mampu menunjukkan adanya pelayanan publik yang prima dan inovatif.

Pada tahun 2025, BPPB memulai pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Mengingat tahun tersebut merupakan tahun pertama pelaksanaan, capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun demikian, BPPB telah menetapkan target nilai pembangunan Zona Integritas sebesar 75 sebagai indikator awal keberhasilan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 serta Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM, Inspektorat Utama berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) yang bertugas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja.

Berdasarkan hasil penilaian TPI, pada tahun 2025 BPPB memperoleh nilai pemenuhan Zona Integritas sebesar 76,68. Capaian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan nilai tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 75. Secara umum, hampir seluruh area perubahan telah memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan. Namun demikian, area tata laksana masih menunjukkan capaian

yang relatif rendah dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai upaya perbaikan, telah dilaksanakan bimbingan teknis dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat guna memperdalam pemahaman serta memastikan implementasi pembangunan Zona Integritas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pelaksanaan bimbingan teknis, selama Triwulan I tahun 2025, berbagai upaya peningkatan kinerja Zona Integritas juga telah diinisiasi oleh Kelompok Kerja Manajemen Perubahan yang berperan sebagai motor penggerak pembangunan ZI di BPPB. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penyempurnaan Sistem Informasi Terintegrasi Pembangunan Zona Integritas (SIGAP-ZI), sehingga seluruh kegiatan pembangunan ZI dapat dipantau, didokumentasikan, dan dievaluasi secara lebih sistematis dan mudah diakses. Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dilaksanakan secara rutin setiap bulan, yang diikuti secara aktif oleh seluruh personel BPPB dan dipimpin langsung oleh Kepala BPPB, sehingga memastikan adanya pengawasan dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya.

Seluruh rencana kerja pada masing-masing area perubahan telah dibahas secara komprehensif, kemudian diintegrasikan ke dalam sistem SIGAP-ZI serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPB. Mekanisme pemilihan ketua tim dan anggota tim kerja pembangunan ZI juga telah dilakukan secara terbuka dengan memanfaatkan tools yang terukur, sehingga prosesnya menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan adanya perubahan pimpinan dan tim di lingkungan BPPB, telah dilakukan penganangan ulang komitmen pembangunan Zona Integritas yang melibatkan seluruh jajaran pegawai. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk deklarasi, tetapi juga sebagai penguatan kembali nilai-nilai integritas, peningkatan sense of ownership, serta penyelarasan visi dan langkah strategis dalam mewujudkan WBK dan WBBM secara berkelanjutan.

Selain itu, kegiatan sosialisasi reformasi birokrasi (RB) baik untuk internal BPPB maupun kepada pemangku kepentingan eksternal telah direncanakan dan dilaksanakan secara berkala, guna meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas. Seluruh kegiatan sosialisasi ini dibantu oleh tim Agen Perubahan dan tim Media Sosial di BPPB. Peran pimpinan sebagai role model dalam implementasi ZI juga telah didokumentasikan sebagai bentuk keteladanan dalam penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima.

Pada tahun 2026, Manajemen Perubahan menetapkan beberapa target prioritas strategis, antara lain re-desain sistem BRIGTH sebagai platform penghubung (link hub) untuk mendukung integrasi proses bisnis internal BPPB, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan aman dari sisi pengelolaan data. Selain itu, dilakukan pula re-desain Bio-Legacy untuk meningkatkan kemudahan

akses dan kualitas layanan bagi pelanggan, khususnya dalam proses pelulusan bets vaksin. Target prioritas lainnya adalah *integrasi Laboratory Information Management System (LIMS)* ke dalam sistem yang ada di BPPB, guna meningkatkan integritas data, mempercepat proses pelaporan hasil pengujian, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu.

Melalui berbagai inisiatif dan rencana kerja tersebut, diharapkan BPPB dapat bertransformasi menjadi unit pelaksana teknis yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi, dengan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terpercaya dalam mendukung pengawasan produk biologi di Indonesia.

Tabel 3.16 Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Nilai Pembangunan ZI BPPB	Berdasarkan monev bulanan, realisasi rencana aksi bulan Januari dan Februari telah mencapai 100%, namun realisasi bulan Maret menunjukkan pencapaian 81.58% (data pada SIGAP-ZI). Hal ini disebabkan beberapa rencana belum terealisasi karena waktu pelaksanaan monev yang dilaksanakan di hari kedua di awal bulan sehingga beberapa data dukung belum dapat disediakan. LKE dan data dukung PZI serta audit oleh AI dapat diselesaikan tepat waktu	Tanggal rencana Monev RB akan dituliskan pada Rencana Aksi sehingga diharapkan tiap tim kerja dapat mempersiapkan data dukung sebelum monev RB dilaksanakan	Tanggal rencana Monev RB akan dituliskan pada Rencana Aksi sehingga diharapkan tiap tim kerja dapat mempersiapkan data dukung sebelum monev RB dilaksanakan	April	Ya	MR/BPPB/06 MR/BPPB/07 MR/BPPB/08 MR/BPPB/09 MR/BPPB/10 MR/BPPB/11 MR/BPPB/12	- Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPPB tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan - Rencana Aksi pokja Manajemen Perubahan di lingkungan BPPB tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan - Belum semua pegawai di BPPB memahami Sistem Manajemen POM terintegrasi - ABK existing sudah tidak sesuai dengan semakin bertambahnya beban kerja di BPPB - Rencana Aksi Pokja Penguatan Pengawasan di lingkungan BPPB tidak terlaksana sesuai dengan perencanaan - Ketidakefektifan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan akuntabilitas di BPPB - Loker pelayanan publik BPPB di Gedung Athena belum beroperasi sesuai dengan standar pelayanan

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timelime</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>

IKU 3.2. Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dikenal sebagai Pedoman SAKIP, yang saat ini telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan diganti dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025. Pedoman SAKIP merupakan acuan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Dalam acuan terbaru ini, Pedoman SAKIP terdiri atas:

- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja;
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- e. reviu laporan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- f. kertas kerja evaluasi rencana strategi

Tahun 2026 merupakan tahun pertama bagi Balai Pengujian Produk Biologi untuk dilakukan evaluasi SAKIP secara mandiri dan terpisah dari satker induknya yaitu PPPOMN, dimana target nilai AKIP BPPB tahun 2026 adalah 75.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I tahun 2026 dalam rangka pencapaian target nilai AKIP BPPB, diantaranya:

1. Pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPB tahun 2026 yang dipimpin Kepala BPPB;
2. Penginputan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPB tahun 2026 pada aplikasi Simetris;
3. Desk finalisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPB tahun 2026 dengan PIC Biro Perencanaan dan Keuangan;

4. Penetapan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPPB tahun 2026 yang disahkan oleh Para Pihak (Kepala BPPB dan Kepala PPPOMN) dan melaporkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Penyusunan Manual IKU BPPB sesuai konsep SMART-C dan menginput pada aplikasi Simetris;
6. Pengembangan kompetensi petugas pengelola akuntabilitas melalui Bimtek SAKIP dan pelatihan tidak terjadwal pada aplikasi IDEAS;
7. Dialog kinerja dalam rangka penetapan ketua tim indikator kinerja di lingkungan BPPB dan pengesahan SK Kepala BPPB tentang Ketua Tim Indikator Kinerja, dll.
8. Dialog kinerja dalam rangka penjenjangan kinerja dan penyusunan MPH (Matriks Peran dan Hasil) ketua tim dan anggota;
9. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menginput pada aplikasi SIMAKIN;
10. Evaluasi internal berkala melalui monitoring dan evaluasi kinerja, anggaran dan manrisk setiap bulan;
11. Verifikasi data kinerja kepada ketua tim pengampu indikator kinerja pada saat monev bulanan;
12. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPB Tahun 2027.

Tabel 3.17 Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	1. BPPB belum pernah dilakukan penilaian AKIP pada tahun-tahun sebelumnya 2. Belum tersedia prosedur internal dalam pengukuran dan pelaporan kinerja	1. Persiapan penilaian AKIP BPPB dalam hal SDM pengelola akuntabilitas melalui pengembangan kompetensi 2. Penyusunan SOP pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPB	1. Bimtek SAKIP dan pelatihan tidak terjadwal personel pengelola akuntabilitas 2. Penyusunan prosedur pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPB	April	Ya	MR/BPPB/11	Ketidakefektifan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan akuntabilitas di BPPB

IKU 3.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) masing - masing 50% bobotnya. Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun terdiri dari 8 indikator, meliputi : Revisi DIPA (10%), Deviasi Hal III DIPA (15%), Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP(10%), Capaian Output (25%). Dispensasi SPM dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk nilai EKA yaitu terdiri dari 2 variabel sebagai berikut :

1. Variabel efektivitas : Capaian Rincian Output (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi : Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (15%)

Cara Perhitungan dan Formula Nilai Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2025
Nilai Kinerja Anggaran : (Nilai IKPA X 50%) + (Nilai EKA x 50%)

Tabel 3.28. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Pada triwulan I tahun 2026 tidak ada Target indikator Kinerja, karena dilakukan pada akhir tahun sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan RI. Namun demikian, kegiatan-kegiatan telah dilakukan selama triwulan I tahun 2026 dalam rangka mengawal pencapaian target di akhir tahun, diantaranya:

1. Penetapan SK PPK, Bendahara, PPSPM, PP dan Tim Keuangan;
2. Revisi DIPA tepat waktu;
3. Pendaftaran belanja kontraktual ke KPPN tepat waktu;

4. Penyelesaian tagihan tepat waktu;
5. Pengelolaan UP dan TUP yang optimal;
6. Koordinasi oleh Bendahara Pengeluaran dengan PIC KPPN;
7. Koordinasi dengan Tim UKPBJ dan LPSE BPOM terkait pengadaan barang/jasa;
8. Koordinasi internal baik oleh Tim Pengadaan maupun dengan seluruh unsur di BPPB terutama terkait penyerapan anggaran.

Pada TW I tahun 2026, terdapat beberapa tantangan dalam mewujudkan nilai IKPA yang maksimal diantaranya pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran yang belum optimal mengingat terdapat watu libur nasional dan cuti bersama yang cukup panjang. Selain itu, deviasi yang cukup besar (-14,14%) antara pelaksanaan realisasi belanja dengan rencana penarikan dana yang mengakibatkan nilai pada komponen Deviasi Halaman III DIPA juga tidak maksimal. Untuk itu diperlukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan pada triwulan II tahun 2026 sebagaimana dinarasikan pada matriks rekomendasi di bawah ini.

Tabel 3.18 Matriks Rekomendasi Triwulan I

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelol a sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	Nilai IKPA BPPB TW 1 belum maksimal pada poin RPD dan Penyerapan Anggaran	Monitoring dan Evaluasi secara berkala	1. Rapat monev kinerja dan anggaran setiap bulan 2. Pembuatan akun MyIntress untuk PPK 3. Penambahan personel pengelola anggaran mengingat TA 2026 BPPB juga mengelola dana hibah untuk lebih mengawal RPD dan percepatan penyerapan anggaran 4. Peningkatan koordinasi bendahara dengan KPPN	Desember	Ya	MR/BPPB/13	Pengelolaan anggaran di BPPB belum sesuai dengan perencanaan

IKU 3.4. Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi

Pada ISO31000:2018, Manajemen risiko merupakan aktivitas-aktivitas terkoordinasi, yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM dan Keputusan Inspektur Utama Badan POM Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tujuan manajemen risiko adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik
2. Menetapkan dan mengelola risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan
3. Melindungi organisasi dari risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan organisasi
4. Meningkatkan kinerja organisasi di dalam pencapaian tujuan
5. Menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko

Di BPOM, penilaian maturitas manajemen risiko pada unit kerja dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, dengan kategori penilaian yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.19. Kategori Penilaian Maturitas Manajemen Risiko

<i>Menuju Tingkat Maturitas</i>	<i>Skor Total</i>	<i>Nilai Maturitas</i>	<i>Tingkat Maturitas</i>
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	Belum sadar risiko
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Dari laporan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko Balai Pengujian Produk Biologi oleh Inspektorat Utama tahun 2025, BPPB memperoleh nilai maturitas 1,969 dengan tingkat maturitas Risk Naive (belum sadar risiko) yang artinya penerapan manajemen risiko di BPPB masih tergantung pada individu perorangan.

Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari Inspektorat dan surat Inspektur Utama nomor B-PI.06.07.71.7.01.26.01 tanggal 06 Januari 2026 tentang Pemberitahuan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester I Tahun 2026, maka pada Triwulan I tahun 2026 Balai Pengujian Produk Biologi telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yaitu:

1. Melaporkan manajemen risiko semester I tahun 2026 pada aplikasi SAPAAPIP sesuai dengan timeline (sebelum tanggal 20 Januari 2026). Sebanyak 33 daftar risiko BPPB yang dilaporkan telah mencakup seluruh kategori risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan inovasi di BPPB
2. Melaksanakan Pelatihan/ Refreshment Manajemen Risiko untuk seluruh staf BPPB dengan narasumber dari Inspektorat II pada tanggal 6 Februari 2026
3. Melakukan revisi IKU/PBT/076 tentang Penyelenggaraan Manajemen Risiko di BPPB dengan menambahkan rencana pengembangan kompetensi kepada staf di BPPB terkait manajemen risiko minimal 1 tahun sekali dan ketentuan monitoring evaluasi ManRisk secara berkala/setiap bulan di BPPB
4. Melakukan reuiu dokumen manajemen risiko semester I oleh Auditor Internal BPPB
5. Telah dilaksanakan monev manajemen risiko rutin setiap bulan selama triwulan 1 tahun 2026

Tabel 3.20 Matriks Rekomendasi Triwulan I

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	Sampai saat ini belum ada kendala yang berarti, karena telah dilakukan Monev setiap bulan untuk melihat progress setiap daftar risiko, hanya harus lebih ditingkatkan komunikasi dengan para pic daftar risiko untuk update progress. Di TW 1 ini, sosialisasi daftar risiko baru dilakukan sebagian saat Monev ManRisk saja, belum	Dilaksanakan sosialisasi daftar risiko Semester I ke seluruh staf di BPPB.	1. Dari hasil Monev Manrisk Maret 2026, pada TW 2 ini akan ditambahkan 2 risiko baru yaitu: risiko terkait pengelolaan limbah biologi di BPPB dan risiko dari Ka.Tim Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri 2. Sosialisasi SOP Penyelenggaraan ManRisk yang telah direvisi dan sosialisasi daftar risiko akan dilakukan pada TW 2 ini	Juni	Ya	MR/BPPB/14	Monitoring evaluasi implementasi manajemen risiko di BPPB tidak terlaksana setiap bulan

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan</i>	<i>Rekomendasi</i>	<i>Rencana Tindak Lanjut</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
		dilakukan secara menyeluruh kepada semua staf.						

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tabel 3.21. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2025

<i>No</i>	<i>Indikator</i>	<i>Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya</i>	<i>Rekomendasi TW sebelumnya</i>	<i>Rencana TL TW sebelumnya</i>	<i>Status</i>	<i>Progres TL TW sebelumnya</i>	<i>Timeline</i>	<i>Apakah sudah dikelola sebagai risiko</i>	<i>Kode Risiko</i>	<i>Peristiwa Risiko</i>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA- 063.01.2.691154/2026 tanggal 01 Desember 2025, pagu awal anggaran BPPB tahun 2026 adalah sebesar Rp6.604.661.000,00 dan mengalami perubahan jumlah pagu anggaran menjadi sebesar Rp6.532.257.000,00 sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Utama Badan POM Nomor PR.04.02.2.12.25.771 tanggal 22 Desember 2025 tentang Penyampaian Data Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden, dimana BPPB diminta untuk melakukan penyesuaian berupa pergeseran anggaran ke RO Khusus senilai Rp72.404.000 melalui proses revisi terpusat dari Badan POM sesuai dengan surat pengesahan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-063.01.2.691154/2026 tanggal 24 Desember 2025. Hingga triwulan 1 tahun 2026 pagu anggaran BPPB belum mengalami perubahan kembali.

Berdasarkan aplikasi Myintress, realisasi anggaran Balai Pengujian Produk Biologi triwulan 1 tahun 2026 adalah sebesar Rp835.630.331,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) atau sebesar 12,79% terhadap pagu Rp6.532.257.000,00.

Tabel 3.22 Realisasi Kinerja Dibandingkan dengan Realisasi RPD Triwulan 1 Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% capaian	RPD TW 1	Realisasi	% realisasi
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai Pengujian Produk Biologi sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	90,15	91,98	102,03	8.507.000	11.588.440	136,22
		2. Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45	99,39	99,94	14.505.025	6.750.000	46,54
		3. Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,3	100	109,53	27.685.000	40.859.100	147,59
		4. Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap	N/A	TW 3 dan TW 4	N/A	29.970.000	0	0,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% capaian	RPD TW 1	Realisasi	% realisasi
		kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi						
2	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	1. Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	N/A	Akhir tahun	N/A	14.879.000	10.942.200	73,54
3	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1. Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Akhir tahun	N/A	11.124.172	5.176.700	46,54
		2. Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Akhir tahun	N/A	10.250.217	4.770.000	46,54
		3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Akhir tahun	N/A	760.074.754	752.955.541	99,06
		4. Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	N/A	Akhir tahun	N/A	5.562.086	2.588.350	46,54

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2026

<i>No.</i>	<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Pagu Tetap</i>	<i>RPD TW 1</i>	<i>Realisasi</i>	<i>% Realisasi</i>
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3.008.160.000	80.667.025	59.197.540	73,39
2	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	45.700.000	14.879.000	10.942.200	73,54
3	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	3.478.397.000	787.011.229	765.490.591	97,27
063.01.01.691154.Balai Pengujian Produk Biologi		6.532.257.000	882.557.254	835.630.331	94,68

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2026

063.01.01.691154. Balai Pengujian Produk Biologi			Sub Komponen/Kegiatan	Realisasi		
				Keuangan		
				Pagu	Realisasi	% realisasi
				6.532.257.000	835.625.872	12,79
4133.AFA						
4133.AFA.001			Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan			
	051		Pengembangan Metode Pengujian Obat dan Makanan	1867.79.000	0	0,00
		051.0 A	Pengembangan Metode Pengujian Produk Biologi	1867.79.000	0	0,00
4133.BAH						
4133.BAH.003			Layanan Publik Pengujian Produk Biologi			
	051		Layanan Publik Pengujian Produk Biologi	45.700.000	10.942.200	23,94
		051.0A	Inovasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik BPPB	20.615.000	1.170.700	5,68
		051.0B	Forum Konsultasi Publik dan BPPB Customer Forum	25.085.000	9.771.500	38,95
4133.BIA						
4133.BIA.004			Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar			
	051		Pengujian Sampel Balai Pengujian Produk Biologi	1.532.238.000	40.859.100	2,67
		051.0A	Pengujian Laboratorium Sampel Produk Biologi	751.110.000	36.974.100	4,92
		051.0B	Pengujian Laboratorium Sampel BPPB	757.485.000	3.885.000	0,51
		051.0C	Pengujian Sampel Kasus Khusus Pihak Ketiga	23.643.000	0	0,00
4133.BKB						
4133.BKB.001			Laporan Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen			
	051		Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen	40.907.000	12.535.050	30,64
		051.0A	Implementasi SAKIP dan Reviu Jenis dan Tarif PNPB BPPB	18.677.000	4.770.000	25,54
		051.0B	Penguatan Zona Integritas, Program AOC dan Implementasi Manrisk BPPB	22.230.000	7.765.050	34,93
4133.BKB.002			Laporan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar			
	051		Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	134.400.000	6.750.000	5,02
		051.0A	Uji Profisiensi	66.375.000	0	0,00
		051.0B	Workshop Lot Release Vaksin	68.025.000	6.750.000	9,92

063.01.01.691154. Balai Pengujian Produk Biologi			Sub Komponen/Kegiatan	Realisasi		
				Keuangan		
				Pagu	Realisasi	% realisasi
				6.532.257.000	835.625.872	12,79
4133.CAB						
4133.CAB.003			Sarana pengujian sampel Produk Biologi			
	051		Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	835.183.000	8.506.440	1,02
		051.0A	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Fasilitas Perkantoran	835.183.000	8.506.440	1,02
4133.PDD						
4133.PDD.002			Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium			
	052		Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Lingkup	169.718.000	3.082.000	1,82
		051.0A	Peningkatan Kompetensi Staf BPPB	142.598.000	3.082.000	2,16
		051.0A	Verifikasi Lapangan dalam rangka InspeksiSupervisiKompetensi Staf BPPB	27.120.000	0	0,00
6384.EBA						
6384.EBA .956						
	054		Penatausahaan BMN	4.006.000	0	0,00
		054.0A	Penatausahaan BMN	4.006.000	0	0,00
6384.EBA .994						
	001		Gaji dan Tunjangan	1.907.402.000	517.326.825	27,12
		001.0A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan UPT BPPB	1.907.402.000	517.326.825	27,12
	002		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.526.082.000	235.628.716	15,44
		002.0A	Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Administrasi Kegiatan Perkantoran	9.823.000	3.885.000	39,55
		002.0B	Perawatan Peralatan Kantor	9.250.000	3.040.000	32,86
		002.0C	Administrasi Kegiatan Perkantoran	1.147.489.000	225.871.716	19,68
		002.0D	Pemeliharaan Alat Laboratorium	359.520.000	2.832.000	0,79

Tabel 3.25 Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Output (%)	Input (%)	IE	TE	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	103,83	73,39	1,41	0,41	92	Efisien
2	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	-	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		-	-	-	-	-

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Interim BPPB Triwulan 1 Tahun 2026 menggambarkan capaian serta kendala dalam upaya dalam mencapai Sasaran Kegiatan BPPB hingga akhir tahun 2026, yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, pencapaian kinerja BPPB pada triwulan 1 tahun 2026, sebagai berikut:

- i. BPPB memiliki 3 (tiga) sasaran program dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan hasil capaian 2 (dua) indikator kinerja memperoleh penilaian dengan kategori Sangat Baik, 1 (satu) indikator kinerja memperoleh penilaian dengan kategori Baik, dan 6 (enam) indikator kinerja yang belum dalam dilakukan penilaian karena bukan ditargetkan pada triwulan 1.
- ii. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPB triwulan 1 tahun 2026 adalah 103,83 dengan kategori **Istimewa** (biru).
- iii. Realisasi anggaran BPPB triwulan 1 tahun 2026 adalah sebesar Rp835.630.331,- atau sebesar 12,79%.
- iv. Tingkat Efisiensi (TE) BPPB triwulan 1 tahun 2026 adalah 0,41 (capaian 92%) dengan kategori **Efisien**.

REKOMENDASI

Dari penjelasan di atas, semua indikator kinerja BPPB dengan target triwulan telah memenuhi target yang direncanakan. Sedangkan indikator kinerja yang diukur di akhir tahun, tetap berproses dan terus dipantau pelaksanaannya. Diharapkan semua indikator kinerja BPPB dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Menajamkan evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring rencana tindak lanjut rekomendasi triwulan 1 untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau kendala dan sebagai Langkah perbaikan.
2. Melaksanakan analisis dan reuiu terkait pelaksanaan anggaran termasuk kendala dan hambatan secara kritis dan antisipatif sehingga realisasi anggaran tahun 2026 dapat tercapai 100%.

LAMPIRAN I

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BPPB 2026



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi			90,15	90,15	90,15	90,75	90,75	90,75	91,64	91,64	91,64	92,1	638,033,200
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	DR.4133.CAB.003 - Sarana pengujian sampel Produk Biologi	051 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Fasilitas Perkantoran				835,183,000	334,073,200	
			2.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Ungkup				A - Peningkatan Kompetensi Staf BPPB				249,720,000	249,720,000	
			3.	DR.4133.PDD.002 - Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium	052 - Pemenuhan Standar Kompetensi dan Standar Ruang Ungkup				B - Verifikasi Lapangan dalam rangka Inspeksi Supervisi				54,240,000	54,240,000	
			02 - Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar			99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	99,45	150,000,000
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			2.	DR.4133.BKB.002 - Laporan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	051 - Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar				A - Uji Profisiensi		75,750,000	75,750,000			
			3.	DR.4133.BKB.002 - Laporan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	051 - Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar				B - Workshop Produk Biologi		74,250,000	74,250,000			
			03 - Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar			91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	1,866,311,200
			NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN		ANGGARAN	KONTRIBUSI			
			1.	DR.4133.BU.004 - Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang	051 - Pengujian Sampel Balai Pengujian Produk				B - Pengujian Laboratorium Sampel BPPB		757,095,000	757,095,000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

PERJANJIAN KINERJA BPPB 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI DAMAYANTI
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Produk Biologi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MIMIN JIWO WINANTI
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengujian
Produk Biologi



DWI DAMAYANTI

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan Nasional



MIMIN JIWO WINANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGUJIAN PRODUK BIOLOGI**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	02 - Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	01 - Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92.1 Nilai
		02 - Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99.45 Persen
		03 - Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91.3 Persen
		04 - Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	78.1 Persen
2.	06 - Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi	4.85 Indeks
3.	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	76.7 Nilai
		02 - Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	75 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2.05 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 6,532,257,000 (Enam Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4133 - Pengujian Obat dan Makanan	3,094,767,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,437,490,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengujian
Produk Biologi



DWI DAMAYANTI

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat
dan Makanan Nasional



MIMIN JIWO WINANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN III

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2026 Balai Pengujian Produk Biologi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2026	TARGET			REALISASI			% CAPAIAN			Normalisasi Capaian (%)		
			B01	B02	B03	B01	B02	B03	B01	B02	B03			
1	Meningkatnya Laboratorium BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Pengujian Produk Biologi	92,1	-	-	90,15	-	-	91,98	-	-	102,03	102,03
		2	Persentase Keputusan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam Rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar	99,45%	-	-	99,45	-	-	99,39	-	-	99,94	99,94
		3	Persentase Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar	91,3%	-	-	91,3	-	-	100	-	-	109,53	109,53
		4	Persentase Metode Analisis yang Dikembangkan terhadap Kebutuhan Metode Pengujian di Balai Pengujian Produk Biologi	78,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Layanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	4	Indeks Pelayanan Publik Balai Pengujian Produk Biologi yang prima	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	5	Nilai Pembangunan ZI Balai Pengujian Produk Biologi	76,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Nilai AKIP Balai Pengujian Produk Biologi	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Produk Biologi	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7	Indeks Manajemen Risiko Balai Pengujian Produk Biologi	2,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-